

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan tidak seimbangnya dana dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini berimplikasi terhadap pengaturan alokasi dana subsidi pembangunan. Berdasarkan sistem perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa menentukan prioritas sektoral dan subsidi pembangunan kepada yang paling strategis. Selanjutnya pemerintah secara berkala melakukan upaya untuk mencabut subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) melalui kebijakan kenaikan harga BBM, sebagai langkah untuk menyeimbangkan dana dalam APBN tersebut.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi isu menarik ditengah masyarakat. Hal ini terlihat pada media massa yang tak pernah luput dari setiap perkembangan berita mengenai BBM, dan juga aksi-aksi masyarakat, mahasiswa terhadap pemerintah dalam mensikapi kenaikan harga BBM.

Kebijakan mengenai pencabutan subsidi BBM bersumber dari undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, dan undang-undang No. 29 Tahun 2002 tentang APBN 2003. Selanjutnya, kebijakan kenaikan harga BBM tersebut dirumuskan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2002

diumumkan untuk dilaksanakan pertama kali pada 1 Januari 2003 pada masa kepresidenan Megawati hingga 2004.

Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM secara langsung berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik.

Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa.

Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga BBM tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung se-mentara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan.

Akan tetapi meskipun tidak signifikan, kenaikan harga BBM tetap terjadi. Dengan melihat fenomena tersebut dapat dipastikan bahwa harga jual

Rakyat kecil menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam pencabutan subsidi BBM, meskipun minyak tanah tetap disubsidi oleh pemerintah untuk rakyat kecil. Dengan tingkat daya beli rendah, masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumen, masih dibebani lagi dengan naiknya harga barang kebutuhan di pasar, yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi industri akibat dari kenaikan harga BBM. Sementara, tidak ada peningkatan pendapatan masyarakat sedikitpun. Suparmoko (2001 :88) mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah sangat parah setelah terjadinya kenaikan harga BBM, tercatat bahwa tingkat pertumbuhan mencapai angka negatif 14%, jumlah pengangguran bertambah 15% dari jumlah angkatan kerja, dan kemiskinan meningkat 400% dengan perkiraan mencapai 80 juta penduduk.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kenaikan harga BBM cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, dalam hal ini pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan, meskipun dalam pemberitaan di media massa, masyarakat menengah ke atas dan industri lebih diperhatikan.

Masyarakat nelayan merupakan bagian juga dari masyarakat umum. Cukup disayangkan, bahwa masyarakat nelayan umumnya berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Padahal, melihat potensi kelautan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia, dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km². kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam terbesar di sektor

nelayan banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia yang berdomisili di sepanjang garis pantai. Dalam kaitannya dengan hal ini, S. Budi Santoso, Lidyastuti S, Wisnu S, dan Sunardi dalam Santoso (1983 :23) mengatakan bahwa:

“Lingkungan perairan di Indonesia dapat dikategorikan atas perairan laut yang dikenal dengan nama laut nusantara dan perairan daratan, karena itu muncul pemukiman-pemukiman penduduk sesuai dengan lokasi kondisi fisiknya, pemukiman penduduk di sekitar desa tersebut disebut dengan desa pantai. Umumnya mereka memanfaatkan perairan laut sebagai sumber penghidupan sebagai nelayan. Pemukiman yang masyarakatnya dominan sebagai nelayan disebut masyarakat nelayan.”

Jika melihat besarnya potensi sumber daya alam khususnya pada sektor perikanan, maka persepsi yang terbangun dalam masyarakat terhadap individu-individu atau tenaga kerja yang mengelolanya seharusnya dalam kondisi yang sejahtera. Akan tetapi, realita sosial yang dihadapi adalah justru sebaliknya, bahwa masyarakat nelayan secara umum hidup dalam kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mubyarto (1984 :52) yang menyatakan bahwa:

“Tara hidup masyarakat nelayan di Indonesia rata-rata masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan yang baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara rendahnya tingkat pendidikan sehingga modernisasi terlambat dan hasil rendah, tempat tinggal nelayan yang tidak mencerminkan perumahan yang sehat serta mobilitas yang rendah.”

Masyarakat nelayan sehari-hari menjalankan usahanya dengan bergantung pada peralatan yang cenderung tradisional. Meskipun demikian tetap saja peralatan-peralatannya membutuhkan bahan bakar. Dengan berbagai fenomena yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat nelayan sehubungan

mendapatkan perhatian lebih lanjut. Permasalahan ini dapat dilihat dari kondisi atau posisi sosial nelayan dalam masyarakat.

Masyarakat nelayan pada umumnya tergolong berkasta rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan adalah akibat keterasingan, yang terjadi karena sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain.

Posisi sosial nelayan dapat dilihat juga secara politis, salah satu ciri nelayan kecil (*small-scale fisher*) adalah ketiadaan kemampuan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Akibatnya, nelayan terus dalam posisi dependen dan marginal. Dari pembahasan tersebut, terlihat faktor kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital, semakin besar pula kesempatan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Jadi, kekuatan ekonomi atau kapital mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan politik, hukum dan sosial.

Tingkat kesejahteraan hidup yang rendah juga terjadi pada masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Berdasarkan realita kehidupan masyarakat nelayan yang termarginalkan, sementara dalam menjalankan mata pencahariannya cukup bergantung terhadap penggunaan BBM, maka dengan adanya kenaikan harga BBM secara pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka. Contohnya saja dalam hal pendapatan, dengan kenaikan

lebih besar. Sebab, penggunaan BBM solar adalah modal utama nelayan untuk melaut. Kemungkinan yang terjadi adalah nelayan bagan (pengguna kapal) harus mengeluarkan biaya pembelian BBM yang lebih besar dari pada yang biasanya, sementara hasil yang didapat dari aktivitas melaut itu sendiri tidak pasti. Terlebih, bagi nelayan bagan masih terdapat tanggung jawab untuk membayar nelayan-nelayan buruh yang membantu selama melaut. Dari hal diatas dapat dipastikan bahwa terjadi ketidakseimbangan antar pendapatan dan pengeluaran pada aktivitas nelayan.

Adapun yang menjadi alasan pengambilan obyek penelitian pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang adalah karena masyarakat nelayan dikelurahan tersebut termasuk salah satu perkampungan nelayan yang cukup besar di Bandar Lampung, berpenduduk padat, memiliki lokasi yang cukup strategis dengan tempat pelelangan ikan (TPI) Lempasing dan Pulau Pasaran yang merupakan pusat perdagangan ikan asin juga masih termasuk lingkungan Kelurahan Kota Karang itu sendiri. Faktor tersebut mengindikasikan bahwa nelayan yang berdomisili di Kelurahan Kota Karang adalah nelayan yang cukup produktif dalam menjalankan mata pencahariannya (melaut).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya masyarakat ekonomi menengah keatas dan industri saja yang akan mengalami dampak atas kenaikan harga BBM, akan tetapi juga masyarakat nelayan yang hidup di bawah tingkat kesejahteraan. Dalam hal ini, kebijakan kenaikan harga

masyarakat secara umum, khususnya pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Dampak kebijakan ini akan diukur dari kurun waktu kenaikan harga BBM pada awal tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.

B. Perumusan Masalah

Melihat rendahnya kondisi atau posisi sosial ekonomi nelayan dalam masyarakat yang kehidupannya tergantung pada BBM dan termarginalkan, di tengah fenomena kenaikan harga BBM yang terus melonjak sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehidupan masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang setelah adanya kenaikan harga BBM pada awal Januari 2003 sampai akhir Nopember 2004 yang dilakukan secara bertahap hingga sekarang, serta bagaimana dampak dari

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan teoritik:

Menambah perbendaharaan kajian mengenai dampak kebijakan, khususnya yang menyangkut masyarakat nelayan.

b. Kegunaan praktis:

Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai gambaran dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi terhadap revisi kebijakan tersebut.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu, sehingga akan tampak jelas sistematis dan ilmiah dalam melakukan penelitian. (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi 1986:34).

Maka dari itu dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai unsur yang penting adalah teori, karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

Menurut *F.N, Kerlinger*, dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research*.

“Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep” (Jimmi Mohammad Ibrahim, 1999:33)

Sedangkan *Koentjaraningrat* berpendapat bahwa teori adalah:

“merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”
(Koentjaraningrat, 1990 : 87)

Dari definisi-definisi tersebut diatas, teori mengandung 3 (tiga) hal:

- a. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang paling berhubungan
- b. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep
- c. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

a. Kebijakan

Perserikatan bangsa-bangsa mengartikan kebijakan sebagai pedoman bertindak, mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana. (Wahab, 1991:2).

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, dalam Wahab (1991:21) mengklasifikasikan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam definisi, yaitu:

- 1) *Policy as label for field of activity* (kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu).

Dari berbagai pengertian mengenai istilah kebijakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kebijakan merupakan sekumpulan keputusan atau tindakan individu, kelompok, pemerintah ataupun swasta yang dapat dilaksanakan serta mempunyai pengaruh terhadap sejumlah orang yang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, menurut David Easton dalam Islamy (1986:19) adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Hanyalah pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu padanya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Kemudian disebutkan pula oleh Thomas R. Dye dalam islamy (1986:18) bahwa:

“Kebijakan pemerintah adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah pun termasuk kebijakan pemerintah.”

Masih dalam buku yang sama, James E. Aderson seperti

dikutip oleh Islamy (1986:18) mengatakan bahwa:

“Kebijakan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang dilambangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian tersebut adalah bahwa:

1) Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau

- 2) *Policy as expression of general purpose or desire state of affairs* (kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum/keadaan tertentu yang dikehendaki).
- 3) *Policy as spesific proposals* (kebijakan sebagai usulan-usulan khusus).
- 4) *Policy as decision of government* (kebijakan sebagai putusan-putusan pemerintah).
- 5) *Policy as formal authorization* (kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal).
- 6) *Policy as programme* (kebijakan sebagai program).
- 7) *Policy as output* (kebijakan sebagai pengeluaran).
- 8) *Policy as outcome* (kebijakan sebagai hasil akhir).
- 9) *Policy as theory or model* (kebijakan sebagai teori atau model).
- 10) *Policy as proses* (kebijakan sebagai proses).

Masih dalam buku yang sama (1991:22), W.I Jenkins memandang kebijakan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Sementara itu Carl J. Friedrich dalam *Islamy* (1986:17) mendefinisikan kebijakan sebagai:

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Selanjutnya Raksasataya dalam *Islamy* (1986:17, mengemukakan konsep kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.”

- 2) Kebijakan ini berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan ini adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang dan bersifat memaksa/otoritatif.”

Sedangkan menurut Islamy (1986:20), pengertian kebijakan adalah:

“Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Implikasi dari pengertian kebijakan pemerintah tersebut adalah:

- 1) Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- 3) Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujuakan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.”

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi bagi kepentingan masyarakat.

c. Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:8) memaparkan bahwa sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan-tindakan tersebut dapat mewujudkan

para pembuat kebijakan ataupun pendesain proyek dan program, dimana kegagalan dalam implementasi bisa saja terjadi disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan yang tidak diramalkan sebelumnya. Oleh karena itulah evaluasi dilakukan.

Van Meter dan Van Horn, dalam Wibawa dkk (1994:15) bahwa evaluasi kebijakan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta baik secara individu ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijaksanaan. Hakekat penilaian yang begitu lekat dalam evaluasi, menurut Siagian (1981:14) dalam Novelia (1998) adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian ditujukan pada proses tertentu dalam suatu proses setelah fase seluruhnya selesai dikerjakan,
- 2) Penilaian bersifat korektif terhadap fase-fase yang selesai dikerjakan itu. Artinya, melalui penilaian harus ditemukan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru itu, juga harus ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang terjadi,
- 3) Penilaian bersifat *prescriptive*, yaitu sesuatu yang bersifat mengobati. Artinya, melalui penilaian harus pula dapat dibuktikan atau diberikan resep untuk mengatasi,
- 4) Penilaian ditujukan pada fungsi-fungsi organik lainnya.

Menurut Dunn (2000:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dimana evaluasi dapat pula menyumbang pada revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi kebijakan sebagai bagian dari analisis kebijakan memiliki tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan rekomendasi adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif, yaitu setelah adanya aksi-aksi kebijakan atau diimplementasikan, sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*ex ante*), yaitu sebelum ada aksi kebijakan atau diimplementasikan. (Dunn, 2000:611)

Ditambahkan pula oleh Dunn dalam Nugroho (2003:121) bahwa evaluasi dapat dikategorikan menurut *timing*, yakni: evaluasi yang dilakukan sebelum implementasi kebijakan (evaluasi summatif), evaluasi pada waktu implementasi kebijakan (evaluasi proses), dan evaluasi sesudah implementasi kebijakan (evaluasi konsekuensi).

dilakukan setelah proses saja, akan tetapi juga dapat dilakukan sebelum proses implementasi.

Jadi evaluasi dalam kajian ini adalah suatu proses analisa dan penilaian terhadap suatu kebijakan yakni kebijakan kenaikan harga BBM, yang dimaksudkan untuk dapat memberi rekomendasi pada revisi kebijakan, berkenaan dengan keputusan pemerintah atas pencabutan subsidi BBM.

d. Jenis Evaluasi

Fintersbuch dan Motz, dalam Wibawa dkk (1994:74) sebagai mana dikutip oleh wulandari (1996) memaparkan empat jenis evaluasi atas dasar kekuatan kesimpulan yang diperolehnya, seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Empat Jenis Evaluasi Menurut Fintersbuch dan Motz

Jenis Evaluasi.	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi Yang Diperoleh
	Kelompok Sasaran			
	Sebelum	Sesudah		
Single Program after-only	Tidak	Ya	Tak ada	Keadaan kelompok sasaran
Single Program before-after	Ya	Ya	Tak ada	Perubahan keadaan kelompok sasaran
Comparative after-only	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
Comparative before-after	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber : Samodra Wibawa, dkk(1994:74)

Jenis evaluasi yang pertama, yaitu *single program after-only*, evaluator langsung membuat penilaian terhadap program setelah

adalah yang paling lemah, karena: (1) evaluator tidak mengetahui baik-buruknya respon kelompok sasaran terhadap program, (2) evaluator tidak mengetahui apakah baiknya kelompok sasaran itu memang dulu tidak ada dan juga apakah bukan suatu yang lain yang menciptakan kondisi yang baik tersebut.

Jenis yang kedua adalah jenis evaluasi *Single program before-after*, yang akan menutupi kelemahan jenis yang pertama, tapi tidak untuk kelemahan jenis yang kedua itu sendiri. Demikian pula halnya dengan yang ketiga, yaitu evaluasi *Comparative after-only* yang akan menjawab kelemahan yang kedua tapi tidak yang pertama.

Pemilihan jenis studi seringkali ditentukan oleh ketersediaan data. Bila evaluator hanya dapat memperoleh data tentang sasaran program pada waktu program telah selesai, maka ia akan melakukan studi *single program after-only*. Sebaliknya, bila evaluator mempunyai data tentang sasaran pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung, ia cenderung untuk melakukan studi *single program before-after*.

Menurut Langbein dalam Wibawa, dkk (1994:75), disebutkan bahwa sangat beruntung bila evaluator dapat memperoleh data tentang sasaran program dalam kurun waktu yang cukup panjang, misalnya 5 tahun sebelum dan sesudah program berjalan. Ia dapat melakukan studi *single program before-after* yang olehnya disebut *single interrupted time series*.

Lebih beruntung lagi jika evaluator mampu memperoleh data antar waktu kelompok lain yang tidak dikenai program. Ia dapat melakukan studi *comparative before-after* dengan cara *interrupted time series with comparative group* (ITSCG).

Untuk menambahkan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. dalam Nugroho (2003:119) membagi evaluasi menjadi tiga: evaluasi proses yaitu mengangkut proses dari kebijakan, evaluasi dampak yaitu menyangkut pengaruh dari kebijakan, evaluasi kebijakan yaitu menyangkut isi dari kebijakan, dan evaluasi metevaluasi yaitu evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan tertentu.

Dari jenis-jenis evaluasi yang dikemukakan di atas, maka mengacu pada Fintersbuch dan Motz, penelitian ini menggunakan studi yang kedua, yaitu *single program before-after*. Pilihan ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian ini menganalisis satu unit analisis (Kelurahan Kota Karang) oleh karena itu disebut *single*. Sedangkan *before-after*, berarti analisis ini dilakukan dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM yang terjadi dalam kurun waktu awal tahun 2003 sampai dengan sekarang, berdasarkan pada dikelurkannya Keppres No.90 Tahun 2002. Selanjutnya berdasarkan James P. Lester dan Joseph Steward, maka studi dalam penelitian ini

... .. untuk melihat hasil atau pengaruh kebijakan

kenaikan harga BBM terhadap masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang.

e. Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Suryaningrat (1989:108) dalam kebijakan pemerintah selalu ada evaluasi, dan yang paling banyak mengevaluasi kebijakan pemerintah adalah obyek kebijakan, dalam hal ini adalah rakyat. Mereka mengevaluasi kebijakan karena kebijakan tersebut mempunyai dampak kepada kehidupan mereka. Oleh karena dampak inilah kebijakan disebut kebijakan publik. Selanjutnya ia merumuskan pengertian evaluasi kebijakan pemerintah sebagai penilaian akibat dan *impact* kebijakan terhadap publik dengan mengadakan perbandingan antara hasil, *output*, *outcome*, dan produk kebijakan, yaitu kebijakan publik yang telah ditentukan dan dipergunakan sebagai standar dengan akibat, *impact* maupun hasil yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila hasil tersebut sesuai dengan standar, maka kebijakan dapat dikatakan sukses, meskipun demikian perlu diteliti ulang apakah masih ada kemungkinan untuk lebih meningkatkan hasil tersebut. Bila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan standar, harus segera diambil tindakan korektif dengan meneliti apa, mengapa, dan bagaimana ketidaksesuaian tersebut terjadi.

Berdasarkan Islamy (1986:112), penilaian kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak

dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan negara, dan dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi dan hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijakan negara.

Dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijakan negara, menurut Anderson dalam Islamy (1986:115) terdapat beberapa dimensi dampak kebijakan yang harus dipertimbangkan dengan seksama, yaitu:

- 1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik dalam problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijakan itu terutama ditujukan pada siapa, dan hal ini perlu ditentukan terlebih dahulu.
- 2) Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut '*externalities*' atau '*spillover effects*'. Limbah kebijakan ini bisa positif atau bisa pula negatif.
- 3) Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- 4) Dampak kebijakan terhadap "biaya" langsung atau *direct cost*. Menghitung "biaya" setiap rupiah dari setiap program kebijakan pemerintah (*economic cost*) relatif lebih mudah dibandingkan

- 5) Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian karena hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).

Dari beberapa dimensi dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Andersen tersebut maka dimensi dampak yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada dimensi dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM terhadap masyarakat nelayan yang notabene adalah pengguna BBM. Apabila menimbulkan dampak yang diharapkan, berarti kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Namun, apabila menimbulkan dampak yang tidak diharapkan maka kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain kebijakan tersebut telah menimbulkan masalah baru yang juga perlu dicarikan penyelesaiannya.

Selanjutnya, Islamy (1986:117) mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, banyak kebijakan negara yang tidak memperoleh atau mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan negara tidak memperoleh dampak sebagaimana yang diharapkan tersebut yaitu:

- 1) Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan

- 2) Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijakan negara
- 3) Problem-problem publik seringkali timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut. Dengan sedikitnya faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut, akan berakibat sulitnya kebijakan itu memberi dampak yang diharapkan
- 4) Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan caranya sendiri hingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Atau, dengan kata lain bila implementasi kebijakan negara itu dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, maka dampaknya akan semakin jauh dari yang diharapkan.
- 5) Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain
- 6) Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalah sendiri
- 7) Banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas
- 8) Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang

- 9) Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang lain dari masalah-masalah yang telah ada

Dengan demikian para pembuat kebijakan harus menilai dampak kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya dan menjadikan dampak kebijakan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan negara berikutnya sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas kebijakan.

Grindle dalam Wahab (1991:126) mengemukakan beberapa hal yang tercermin dalam hasil akhir implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Dampaknya terhadap masyarakat, perseorangan atau kelompok. Dampak diartikan sebagai perubahan dalam kondisi ekonomi kependudukan dan sosial yang sudah mapan atau sedang berkembang yang disebabkan pengenalan dari suatu proyek baru.
- 2) Tingkat perubahan penerimaannya. Hasil akhir suatu implementasi kebijakan dapat diamati pula pada perubahan dari penerimaan yang dialami oleh kelompok yang menjadi sasaran suatu kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM mempunyai dampak positif apabila sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mempunyai dampak negatif apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dampak tersebut bagi masyarakat meliputi

hasil atau pengaruh dari kebijakan kenaikan harga BBM. Dampak positif atau sesuai dengan yang diharapkan atas kenaikan harga BBM yaitu berupa stabilitas atau bahkan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan, sedangkan dampak negatif berkenaan dengan penurunan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

2. Konsep Perubahan Kebijakan

Dalam mengkaji perubahan kebijakan, Parsons (1996:569) bertitik tolak atas dasar kesepakatannya dengan pandangan Lindblom yang mengatakan bahwa proses kebijakan itu bukan merupakan *rational machine*. Sehingga dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa setelah dilakukan evaluasi maka hasil-hasil evaluasi itu akan berdampak langsung terhadap kebijakan yang bersangkutan (baik berupa perbaikan maupun penghentian), adalah pendapat yang naif. Proses kebijakan yang sebenarnya juga merupakan proses politik, terlalu kompleks untuk dipandang sebagai proses linier formulasi-implementasi-evaluasi semata. Bahkan, evaluasi hanya merupakan bahan tambahan sebagai penyeimbang pertarungan kepentingan yang dialektis untuk kemudian terjadi keputusan-keputusan politik tertentu (*policy*).

Dalam mengkaji perubahan kebijakan ini, Parsons dalam Putra (2001:115) memfokuskan diri pada dua aspek perubahan yaitu:

- a. Perubahan dalam ruang lingkup kebijakannya (*policy space*), yakni menyangkut bagaiman perubahan dalam tujuan kebijakan, nilai,

- b. Perubahan dalam ruang lingkup organisasinya (*organizational space*), yakni menyangkut bagaimana kaitan antara perubahan nilai, kepercayaan, tujuan diatas dengan konteks organisasi pengambil kebijakan itu.

Untuk melihat bagaimana kedua aspek perubahan itu terjadi, maka digunakan tiga pendekatan untuk menganalisa, yaitu pendekatan siklus kebijakan (*policy cycle approach*), pendekatan organisasional (*organizational approach*) serta perubahan kebijakan dan pembelajaran kebijakan (*policy change and policy learning*).

Dengan menggunakan pendekatan siklus kebijakan, perubahan pada aspek yang pertama dapat dilihat secara lebih jelas, yaitu perubahan dalam ruang lingkup kebijakannya (*policy space*). Di sisni lebih ditekankan pada penghentian kebijakan (*termination*). Pertanyaan besarnya adalah *was there termination after evaluation; did policy die?* Pertanyaan ini berangkat dari konsep *policy cycle* yang digagas oleh Hogwood dan Peters yang menganggap ada sebuah proses yang linier pada sebuah kebijakan yaitu: *policy inovation-policy succesion-policy maintenance-policy termination*. *Policy inovation* adalah saat dimana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dri hirukpikuk kepentingan yang ada dimasyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. *Policy succesion*, setelah aspirasi ditangkap maka pemerintah mengganti kebijakan dengan yang baru dan lebih baik. *Policy maintenance* adalah

pengadaptasian kebijakan baru. *Policy termination* adalah saat di mana kebijakan yang ada sudah dianggap tidak sesuai lagi dan kebijakan di hentikan. Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Parsons bahwa pendekatan siklus kebijakan ini akan baik bila faktor nilai (*value*) di masukan dalam kerangka analisisnya.

Pendekatan yang kedua, yaitu *organizational approach*. Perubahan yang dilihat adalah aspek organisasinya. Maka dalam studi *public policy*, organisasi yang dimaksud adalah organisasi publik, sehingga pertanyaannya adalah *what forces bring about change in public sector organizations?*

Selanjutnya mengenai perubahan organisasi ini, Di Maggio dan Powell dengan konsepnya yang disebut *institutional isomorphism*, memiliki tiga mekanisme, yaitu: *coercive*, yaitu adanya tekanan-tekanan kuat dari organisasi lain agar organisasi yang bersangkutan melakukan perubahan (tekanan ini bisa bersifat formal atau informal), *mimetic*, yaitu perubahan yang disebabkan karena organisasi yang bersangkutan meniru (*copying*) organisasi lain yang dianggap lebih menjanjikan solusi, dan *normative*, bekerja para profesional untuk mengubah organisasinya agar lebih sejalan dengan trend di lingkungannya (Putra, 2001: 1180).

Pendekatan terakhir yang digunakan Parsons dalam melihat perubahan kebijakan adalah *policy change and policy learning*. Seperti yang telah disarankan pada *policy cycle approach* bahwa nilai harus

sangat menekankan pada komunitas dan keinginan-keinginan mereka akan bentuk baru atas tatanan sosial ekonomi yang ada. Sehingga, di sini pembuat kebijakan tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan debat publik di lapangan. Oleh karenanya kemudian perlu adanya *mutual learning* antara pengambil kebijakan dengan masyarakat secara umum.

Jadi perubahan kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan yang berkenaan dengan penundaan pencabutan subsidi BBM pada saat pemberlakuan Keppres No.90 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Jual BBM Dalam Negeri yang diumumkan tanggal 21 Januari 2003.

3. Tinjauan Tentang Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah suatu masyarakat yang bekerja pada sektor perairan yaitu sebagai pencari ikan, pencari binatang air. Berdasarkan definisi ditjen perikanan yang dikutip oleh Satria (2002: 26), pengertian nelayan adalah sebagai berikut:

“Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Adapun orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau mengangkut alat-alat perlengkapan kedalam perahu atau kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Sementara itu, ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap disebut sebagai nelayan meskipun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan ikan. Sama dengan penangkapan ikan, pada kegiatan pembudidayaan, orang yang disebut sebagai petani ikan adalah orang yang melakukan pekerjaan memelihara ikan sebagai anggota rumah tangga maupun buruh atau tenaga kerja.”

Sedangkan definisi nelayan menurut keputusan menteri pertanian RI No.5/KPTS/IK120/II/1990 tentang perizinan usaha perikanan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari penangkapan ikan.

Dilihat dari status perusahaan kapital, Satria (2002:24) membagi nelayan menjadi:

- a. Nelayan pemilik atau juragan, yaitu orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal atau perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya.
- b. Nelayan buruh, yaitu orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut, atau sering disebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

Selanjutnya Ditjen perikanan dalam buku yang sama (2002:26) juga mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan, yaitu:

- a. Nelayan atau petani ikan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.
- b. Nelayan atau petani ikan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.
- c. Nelayan atau petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang

operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.

4. Ditinjau Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan seseorang, keluarga, dan perlengkapan materiil yang dimiliki oleh keluarga itu dimana keadaan sosial ekonomi ini dapat bertaraf baik, sedang dan kurang.

Menurut Mubyarto (1984:91), ditinjau sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial budaya dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan masyarakat dan peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi baru dapat dikatakan terjangkau apabila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan usahanya.

Pendapat lain diutarakan oleh Winkell (1984:32), bahwa pengertian sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan materiil yang dimiliki, dimana keadaan itu dapat bertaraf baik, cukup, dan kurang.

Adapun kondisi sosial dan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan keluarga nelayan di Kelurahan Kota Karang, baik menyangkut kesejahteraan keluarga itu sendiri maupun kesejahteraan sosial masyarakat dilingkungan kelurahan tersebut, dalam kaitannya

a. Konsep Untuk Mengukur Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kehidupan masyarakat erat berkaitan dengan pembangunan. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui kebijakan-kebijakannya tentu saja tidak luput dari kepentingan untuk masyarakatnya. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan nasional, yang tidak lain dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun secara sepirituil melalui pertumbuhan sosial ekonomi. Menurut Todaro dalam terjemahan Mursid (1983) sebagaimana dikutip Hernawati (1994) disebutkan bahwa pembangunan didalam ukuran-ukuran ekonomi tradisional cukup dimaksudkan hanya semata-mata berdasarkan tingkat dan pertumbuhan penghasilan secara keseluruhan atau penghasilan per kapita. Akan tetapi lain halnya dengan pandangan ekonomi yang baru tentang pembangunan yang dimaksud adalah:

- 1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- 2) Mengangkat taraf hidup, termasuk menambah, mempertinggi dan pemeratakan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya.

- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individual dan nasional dengan cara membebaskan diri dari sikap ketergantungan dan kebodohan melalui pendidikan.

Berdasarkan pandangan ekonomi baru mengenai pembangunan yang mencakup banyak aspek, maka dalam penelitian mengenai kondisi sosial dan ekonomi nelayan ini, yang menjadi indikator kondisi ekonomi adalah tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Sedangkan indikator sosial adalah tingkatan pendidikan, dan sikap mental.

1) Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penghasilan. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai pendapatan keluarga atau pendapatan rumah tangga:

Dimara (1985:323) mengartikan istilah pendapatan rumah tangga atau pendapatan keluarga sebagai berikut:

“Pendapatan rumah tangga merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal ialah penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan pokok, pendapatan informal adalah penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan diluar pekerjaan pokok. Sedangkan pendapatan subsistem ialah penghasilan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang.”

Selanjutnya Komaruddin dalam Putra (1992:23) mengemukakan bahwa “uang atau materi atau gabungan dari keduanya yang timbul dari penggunaan faktor-faktor produksi,

bunga modal, honorarium, laba dan pensiun". Sementara Singarimbun (1981:24) mengemukakan pendapat lain bahwa "pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, pendapatan keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga."

Dari batasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan kekayaan keluarga baik itu pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem yang diperoleh dari sektor produksi maupun jasa yang berupa upah atau bagi hasil maupun pendapatan tambahan.

Adapun macam-macam golongan pendapatan menurut Mugoddam (1979:85) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Lower income brocket* atau golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- b) *Normal income brocket* atau golongan masyarakat yang berpendapatan sedang.
- c) *High income brocket* atau golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi

Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga nelayan dalam penelitian ini digunakan alokasi dari pendapatan yang

2) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga

Dalam penelitian ini, pembicaraan mengenai pengeluaran maka tidak luput dari kebutuhan pokok rumah tangga. Untuk dapat hidup layak maka manusia harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Thee Kian Wie dalam Sumardi dan Hieter (1985:129), kebutuhan meliputi arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit kebutuhan meliputi barang dan jasa, sedangkan dalam arti luas, selain kebutuhan akan barang dan jasa, juga meliputi akan pendidikan, kesehatan, transportasi, kesempatan kerja, prasarana dan partisipasi sosial.

Sedangkan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar atau *basic human needs* dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau kondisi individu (makan, perumahan, pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan).

Selanjutnya Samir Radwan dan Torkel Alfthan masih dalam Sumardi dan Dieter (1985:2), menulis tanpa mengurangi konsep *basic needs*, keperluan minimum dari seseorang

(2) pakaian, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) air dan sanitasi, (7) transportasi, (8) partisipasi.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dalam penelitian ini, dapat dipakai standar kebutuhan pokok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Singarimbun dalam Sumardi dan Dieter (1985:6), bahwa pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok telah menetapkan sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan (asin/teri), gula pasir, minyak goreng, garam, minyak tanah, sabun cuci, batik kasar dan tekstil kasar.

3) Keadaan Pendidikan Keluarga

Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan keperibadian dan kemampuan didalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Hal ini terbukti dengan adanya pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan masyarakat, seperti tercantum dalam GBHN (1993:42) bahwa pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendidikan anak dalam keluarga nelayan merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki tingkat hidup didalam

mana dikutip oleh Wulandari (1996) bahwa hasil pendidikan diharapkan kelak anak menjadi manusia atau warga masyarakat yang terampil bekerja mampu menyesuaikan diri dengan sekitarnya dan mengatasi masalah dalam kehidupannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting didalam meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola usaha maupun dalam meningkatkan produksi. Tingkat pendidikan yang belum mencukupi sangat mempengaruhi kesejahteraan nelayan, karena mengakibatkan penerimaan teknologi baru serta pembangunan akan terlambat. Begitu penting pendidikan yang menentukan didalam meningkatkan kualitas hidup dan mutu kehidupan keluarga nelayan.

Richard B. Polinac dalam Cernea (1988:264)

mengemukakan dalam penelitiannya sebagai berikut:

“Karakteristik tingkat pendidikan resmi yang secara relatif rendah pada banyak masyarakat penangkap ikan di negara sedang berkembang juga mempunyai pengaruh negatif khususnya dalam hal pengolahan koperasi. Oleh karenanya banyak nelayan yang buta huruf, terasa sulit melatih mereka maupun mendapatkan pengelola dan angkutan yang bermutu di antara mereka. Keadaan buta huruf itu tambah memperburuk oleh masalah korupsi yang mengganggu pengembangan koperasi nelayan karena pengurus koperasi yang korup dapat dengan mudah menipu nelayan yang buta huruf, sebaliknya standar pendidikan yang cukup tinggi pada masyarakat penangkap ikan di Balize mendukung

Dengan demikian begitu pentingnya pendidikan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan serta memperbaiki taraf hidup. Oleh karena itu Suryadi (1992:8) menambahkan

“Bagaimana juga dengan adanya fakta bahwa bentuk pendidikan masyarakat tradisional tidak lagi sesuai dengan kondisi yang berubah dewasa ini tidaklah berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan akan pendidikan masyarakat yang modern dan efisien tidak akan muncul, justru sebaliknya kebutuhan akan hal tersebut sudah sedemikian besarnya dan tumbuh makin besar dengan cepatnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan mengkaji ada tidaknya dampak dari kenaikan harga BBM terhadap keadaan pendidikan anggota keluarga nelayan, terutama anak-anak, baik tercapainya wajib belajar sembilan tahun maupun ada tidaknya yang putus sekolah.

4) Sikap Mental

Dalam upaya menuju terciptanya manusia yang utuh, bahasan mengenai sikap perlu dilakukan karena sikap merupakan titik awal dari gerakan jalan pikiran dan kegiatan manusia dalam kehidupan. Demikian halnya dalam kehidupan sosial masyarakat, sikap individu turut menentukan pembentukan interaksi masyarakat dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan Suit dan Almasdi (1996:19) sikap diartikan sebagai “gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan

dilakukan dalam bentuk ungkapan pemikiran atau tanggapan secara lisan atau dalam bentuk tulisan yang dapat dilahirkan dalam dualisme, yakni melakukan perbuatan sejalan dengan pikiran atau melakukan perbuatan yang sesuai dengan pikiran.

Hal tersebut berkenaan dengan aspek mental, dimana pengertian sikap mental itu sendiri, berdasarkan sumber yang sama (1996:26) adalah “satu ukuran utama dalam menilai perilaku manusia dalam kehidupannya selaku pribadi, kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya terhadap alam lingkungan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Keadaan atau kualitas mental itu sendiri tidak dapat dibaca, hanya dapat ditentukan dengan melihat bukti-bukti nyata yang kadang memakan waktu cukup panjang untuk sampai pada pemberian nilai yang disebut nilai mentalitas atau nilai manusianya.

Secara garis besar, sikap mental dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu sikap mental terkendali dan sikap mental tidak terkendali. Sikap mental terkendali adalah suatu gambaran sikap pada orang-orang yang menyadari perilaku diri. Sikap mental terkendali ini dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu sikap mental terkendali terpuji, dan sikap mental tidak terpuji. Sedangkan sikap mental tidak terpuji, yaitu sikap dari

tetapi tidak tercapai. Sikap mental tidak terkendali juga terbagi dua, yaitu sikap mental tidak terkendali sebagian, yakni bila seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya dalam hal tertentu saja, dan tidak terkendali keseluruhan, yakni bila seseorang sama sekali tidak dapat mengendalikan dirinya dalam segala hal.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mac Dougall dalam Kartono (1994:296) bahwa

“*attitude*/sikap adalah sentimen. Maka sentimen merupakan totalitas dari instink-instink yang terorganisir, yang berkaitan erat dengan emosi-emosi, dan semuanya menjadi sumber penyebab tingkah laku manusia; sehingga menimbulkan bentuk tingkah laku yang berkesinambungan, teratur dan berlangsung cukup lama”.

Hal senada diperkuat oleh pendapat Bogardus dalam buku yang sama (1994:299), yang mendefinisikan *attitude* sebagai “tendensi untuk bereaksi tertentu terhadap faktor-faktor lingkungan, dan bisa bersifat positif atau bisa bersifat negatif”. Selanjutnya dari sumber yang sama, Muzafer Sherif menterjemahkan *attitude* sebagai “...*the main body of what socialized in man*” unsur utama yang tersosialisasi pada diri manusia”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka sikap mental yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

dalam memberikan responnya terhadap fenomena kenaikan harga BBM dan dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Adapun alasan pengambilan sikap mental masyarakat nelayan menjadi salah satu indikator dalam kondisi sosial adalah karena pengaruh reaksi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya, mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat nelayan di kelurahan tersebut.

5) Solidaritas Masyarakat

Solidaritas masyarakat di lingkungan desa nelayan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan. Solidaritas masyarakat erat kaitannya dengan kekerabatan di lingkungan masyarakat. Lingkungan desa nelayan sebagai sebuah karakteristik masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak berada dikota, mengindikasikan bahwa kekerabatan masyarakatnya tergolong baik.

Berdasarkan Laiya (1983:82), solidaritas kekeluargaan dan kehidupan masyarakat itu sangat erat hubungannya dan akan bertambah kuat lagi jikalau seseorang individu menghayati perannya. Hal ini disebabkan karena solidaritas di tengah masyarakat tidak terlepas dari keberadaan keluarga. Keluarga dalam masyarakat dapat dianggap sebagai suatu unit sosial yang bisa berdiri sendiri, baik dalam arti wadah sosial

maupun ekonomi. Apa yang dipelajari oleh seseorang semasa proses sosialisasi dari keluarga, dengan sendirinya merupakan akar dari nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Hubungan keluarga dan masyarakatnya dimulai dari tahap pertentangan. Hubungan tersebut dapat diterangkan melalui dua cara, yakni tanggung jawab keluarga terhadap masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat terhadap keluarga. Sumber solidaritas massa dan kekeluargaan dalam masyarakat secara umum adalah tradisi. Sebagai contohnya adalah tradisi keluarga dengan pendidikan tinggi mampu mengubah mengubah budaya yang berlaku melalui perubahan tingkat kehidupan sosial. (Laiya, 1983:83)

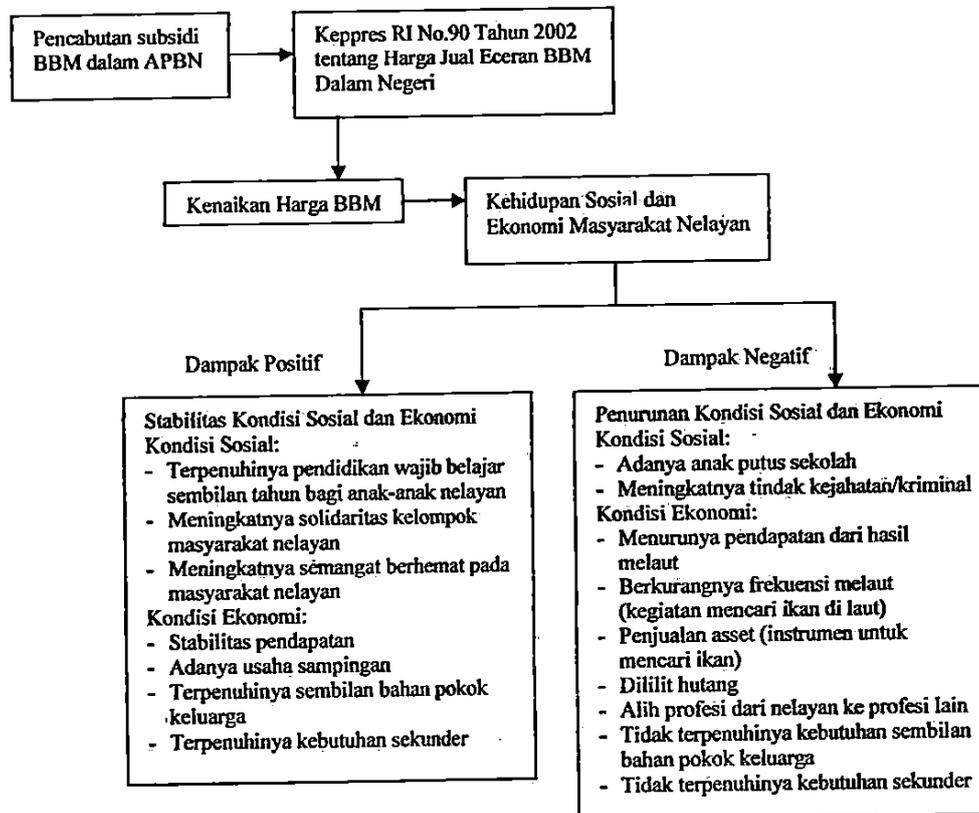
Berdasarkan uraian di atas, maka solidaritas masyarakat di Lingkungan nelayan Kelurahan Kota Karang tidak terlepas dari peran keluarga-keluarga di dalamnya. Solidaritas masyarakat tersebut merupakan sebuah tradisi turun-menurun, yang direalisasikan dalam kekerabatan keluarga melalui gotong-royong. Oleh karena itu, solidaritas masyarakat turut menggambarkan keadaan sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang.

5. Kerangka Pikir

Sejak tahun 1998 sampai sekarang Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan dana yang tersedia dalam APBN menjadi terbatas. Oleh karena itu pemerintah mencabut subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan anggaran dalam APBN. Pencabutan subsidi tersebut dijabarkan melalui Keppres RI No.90 Tahun 2002 yang isinya tidak lain mengenai kenaikan harga BBM yang secara otomatis diikuti pula dengan kenaikan harga barang-barang di pasaran. Keadaan demikian memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat nelayan. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat itu antara lain meliputi pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, dan sikap.

Suatu kebijakan, dikatakan mempunyai dampak positif apabila dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan dikatakan mempunyai dampak negatif apabila dampak yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikir tentang
"Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat Nelayan



E. Definisi Konseptual

1. Kebijakan pemerintah

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Dampak kebijakan

akibat-akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari hasil diberlakukannya suatu kebijakan. Dampak tersebut dapat berpengaruh

pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang, baik berupa dampak yang diharapkan (dampak positif) maupun berupa dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif).

3. Masyarakat nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Adapun orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau mengangkut alat-alat perlengkapan kedalam perahu atau kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Sementara itu, ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap disebut sebagai nelayan meskipun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan ikan. Sama dengan penangkapan ikan, pada kegiatan pembudidayaan, orang yang disebut sebagai petani ikan adalah orang yang melakukan pekerjaan memelihara ikan sebagai anggota rumah tangga maupun buruh atau tenaga kerja. Nelayan juga dapat dikatakan sebagai orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.

4. Kondisi sosial dan ekonomi

suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan materiil yang dimiliki, dimana keadaan itu dapat bertaraf baik, cukup, dan kurang. Kondisi ekonomi terdiri atas pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga nelayan, kondisi sosial terdiri atas

keadaan pendidikan anak-anak nelayan, dan sikap mental masyarakat nelayan yang merupakan respon masyarakat terhadap fenomena kenaikan harga BBM.

F. Definisi Operasional

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian maka operasionalisasi dari penelitian ini diarahkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM 2003, meliputi:

1. Kondisi ekonomi, indikatornya adalah:
 - a. Pendapatan, yaitu penghasilan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan mencari nafkah, dilihat dari:
 - 1) Frekuensi melaut (kegiatan mencari ikan di laut), yaitu tingkat kemampuan nelayan berangkat melaut dalam satu bulan
 - 2) Kepemilikan modal usaha
 - 3) Adanya usaha sampingan
 - 4) Menjual aset (alat tangkap dan kekayaan yang dimiliki)
 - 5) Melakukan alih profesi dari nelayan ke profesi yang lain
 - 6) Tingkat pendapatan pokok rata-rata nelayan per-bulan
 - 7) Kesesuaian antara penghasilan rata-rata dalam satu bulan terhadap pengeluaran rutin setiap bulan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, dilihat dari:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok
 - 2) Pemenuhan kebutuhan sekunder

2. Kondisi sosial, indikatornya adalah:

a. Keadaan pendidikan keluarga, dilihat dari:

- 1) Terpenuhinya pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak nelayan
- 2) Ada tidaknya anak dari keluarga nelayan yang putus sekolah

b. Sikap mental, yaitu perilaku masyarakat yang merupakan respon terhadap adanya kenaikan harga BBM, dilihat dari:

- 1) Hubungan solidaritas kelompok masyarakat nelayan
- 2) Semangat berhemat pada masyarakat nelayan
- 3) Meningkat tidaknya tindak kejahatan/kriminal di lingkungan masyarakat nelayan

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan Nawawi (1983 :63), yang dimaksud dengan metode deskriptif yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan suatu subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Singarimbun (1989:4) memaparkan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Ditambahkan oleh Whitney dalam Nasir (1988:63), metode

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat; serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam sumber yang lain, Nasir (1988), metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berkala. Pada penelitian ini, kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *Schedule questionair* ataupun *interview guide*.

2. Bagan Alir

Pada dasarnya metode ini berusaha untuk mengidentifikasi interaksi antara aktivitas penyebab dampak dan faktor lingkungan yang terkena dampak dalam suatu jaring-jaring sebab, kondisi dan efek. Dampak yang mungkin terjadi dibedakan dalam:

- a. Perubahan tingkat pertama yang disebut kondisi permulaan
- b. Perubahan tingkat kedua yang diakibatkan oleh kondisi permulaan.

Perubahan kedua ini disebut kondisi akibat

Perubahan-perubahan tersebut dapat pula disebut berturut-turut dampak orde pertama, dampak orde kedua dan dampak orde ketiga. Feel selanjutnya dapat mengalami tindakan koreksi atau mekanisme pengendalian atau dicatat dalam indeks acuan.

Keuntungan bagan alir ialah secara lentur dapat berusaha menurut terjadinya dampak. Dampak orde pertama bekerja sebagai penyebab dampak untuk dampak orde kedua, dan seterusnya. Dengan mempelajari uraian proyek, bidang kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan serta literatur, bagan tersebut dapat dibuat relatif mudah dengan menggunakan penalaran logis. (Soemarwoto, 1999:135).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Mantra dan kastro (1989:152), pupulasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cir-cirinya akan diduga. Menurutnya, populasi yang dipilih haruslah memiliki keeratan hubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pendapat diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang berada di Kelurahan Kota Karang dan merupakan pengguna BBM solar (pengguna kapal motor). Adapun alasannya adalah karena solar merupakan kebutuhan vital bagi nelayan dalam kegiatan mata pencahariannya, sehingga pengguna kapal motor tersebutlah yang

Berdasarkan keterangan KUD Mina Lestari Kelurahan Kota Karang yang didapat dari hasil pra-riset, jumlah nelayan pengguna kapal motor yang saat ini masih produktif berjumlah 90 orang nelayan yang kesemuanya akan menjadi responden dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena 90 orang nelayan yang memiliki kapal motor tersebut yang akan lebih merasakan dampak yang di timbulkan dari kenaikan harga BBM

b. Sampel

Menurut Suhardono (2001:2), sampel adalah suatu bagian representatif atau yang mewakili keseluruhan kelompok atau populasi yang diteliti. Karenanya, sampel membutuhkan pengujian atau amatan terhadap suatu porsi dari keseluruhan yang menarik perhatian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari populasi yang diteliti sebagai informasi keseluruhan kelompok.

Mengacu pada permasalahan yang diangkat maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah nelayan pengguna kapal motor yang berjumlah 90 orang. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan tehnik *total sampling*.

4. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah nelayan pengguna kapal motor dan

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan baik melalui pengamatan langsung maupun kuesioner yang akan dilengkapi dengan wawancara, yang diperuntukan bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan dalam melengkapi informasi yang didapat dari data primer, yaitu berupa literatur, buku, surat kabar, bahan bacaan, dokumen resmi dan data sekunder lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner yang akan didukung dengan wawancara dan dokumentasi.

- a. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan, dimana setiap item pertanyaan dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi responden dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang belum terungkap pada kuesioner sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Dokumentasi, digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian ini berupa literatur, buku-buku, surat kabar, bahan bacaan, dokumen resmi dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, tahap-tahap pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu langkah yang dilakukan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh di lapangan, baik melalui kuesioner, wawancara, ataupun melalui dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validasi data yang diolah.

b. Koding

Yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macam dan jenisnya. Klasifikasi dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban tersebut dengan tanda atau kode tertentu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan tenaga yang dapat digunakan untuk mengolah data.

c. Tabulasi

Yaitu langkah menyusun data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dalam bentuk tabel, dengan tujuan untuk menyederhanakan data tersebut agar mudah untuk dipahami. Pada tahapan ini, data dianggap sudah selesai diproses dan selanjutnya disusun kedalam suatu

d. Interpretasi Data

Yaitu memberikan penafsiran data yang ada pada tabel untuk mencari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban hasil dari datanya.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Singarimbun (1989:263), adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana data yang disajikan menggunakan tabel tunggal kemudian dianalisis dan diuraikan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, data tersebut yang memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

Untuk menghitung persentase digunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

Untuk mengetahui jumlah dan persentase populasi tempat penelitian dalam hal ini masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota, Kota Bandar Lampung mengenai tingkat pendidikan, kesehatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan lain-lain yang

F : Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

Jumlah jawaban dari responden yang diberikan kuesioner untuk mengetahui dan mengukur persentase tingkat pendidikan, kesehatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan lain-lain yang tercantum dalam daftar pertanyaan kuesioner.

N : Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Jumlah keseluruhan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengukur persentase tingkat pendidikan, kesehatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan lain-lain yang tercantum dalam daftar pertanyaan kuesioner.

(Soerjono Soekanto, 1986:268)